

# **DINAMIKA PERGANTIAN KABINET MASA DEMOKRASI LIBERAL: DAMPAK TERHADAP STABILITAS POLITIK 1950-1959**

Putri Nurul Hikmah

Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

[Penhahikmah23@students.unnes.ac.id](mailto:Penhahikmah23@students.unnes.ac.id)

## **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dinamika pergantian kabinet masa demokrasi liberal serta dampaknya bagi stabilitas politik. penulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer. Pada sistem demokrasi parlementer rakyat memilih para anggota dari parlemen melalui pemilihan umum yang kemudian anggota dari parlemen tersebut membentuk pemerintahan. Akan tetapi dengan sering bergantinya kabinet pada masa demokrasi liberal 1950-1959 tersebut menjadikan stabilitas politik Indonesia terganggu dan tidak stabil karena hanya berfokus pada pergantian kabinet saja.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Stabilitas, Politik

## **PENDAHULUAN**

Setelah adanya pengakuan kedaulatan RIS, keinginan untuk bergabung dengan negara RIS semakin meluas. Tuntutan terhadap hal semacam ini memang dibenarkan oleh konstitusi RIS yang terdapat pada pasal 43 dan 44, dimana penggabungan yang terjadi antara negara maupun daerah sangat dimungkinkan jika hal tersebut merupakan kehendak rakyat. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Maret 1950 pemerintah RIS telah mendapat persetujuan oleh DPR serta Senat RIS menetapkan undang-undang darurat yang memuat mengenai tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS pada UU.No. 11 Tahun 1950. Kemudian setelah disahkannya UU No. 11 Tahun

1950 tersebut, negara-negara bagian seperti Madura, Jawa Timur, dan Jawa Tengah yang bergabung dengan RI di Yogyakarta.

Setelah semakin banyak negara-negara bagian yang ikut bergabung dengan RI, maka pada 22 April 1950 negara bagian yang tergabung dengan RIS hanya tinggal tiga yaitu Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur dan Republik Indonesia. Karena hal tersebut kemudian perdana menteri dari RIS mengadakan pertemuan. Moh Hatta, Sukawati dari NIT, dan Mansur dari NST mengadakan pertemuan dengan perdana menteri RIS sebagai hasilnya dasar NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ditetapkan dalam konferensi tersebut. Sesuai usulan DPR Sumatera timur, NKRI dibentuk dengan bergabung dengan RIS, bukan bergabung dengan RI.

Kemudian diadakan konferensi kembali yang dihadiri oleh perwakilan RIS, melalui konferensi ini akhirnya tercapai kesepakatan pada tanggal 19 Mei 1950 yang dituangkan dalam Piagam Persetujuan. Piagam persetujuan tersebut memuat kemauan bersama untuk membentuk suatu negara kesatuan sebagai penjelmaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, kemudian memuat penyempurnaan konstitusi RIS dengan pencantuman bagian-bagian penting UUD RI 1945. Dalam hal ini diserahkan kepada panitia gabungan untuk menyusun rancangan UUD negara kesatuan. Panitia persiapan ini diketuai oleh menteri kehakiman RIS Prof. Supomo bersama wakilnya, perdana menteri RI Dr. Abdul Halim. Rancangan UUD negara kesatuan tersebut baru dapat diselesaikan pada 20 Juli 1950, kemudian Undang-undang tersebut dibahas oleh DPR masing-masing dan kemudian diterima oleh senat dan parlemen RIS dan KNIP. Barulah pada tanggal 15 Agustus 1950 UUD tersebut ditandatangani oleh presiden Soekarno yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dengan disahkannya UUDS tersebut, maka secara resmi pada 17 Agustus 1950 terbentuklah Negara Kesatuan. (Setiawan et al., 2018)

Demokrasi liberal Indonesia berlangsung selama Sembilan tahun yaitu dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 yang dikenal dengan sistem parlementer. Sistem politik yang berlaku pada masa demokrasi liberal mendorong akan lahirnya partai-partai politik, hal tersebut terjadi dikarenakan oleh sistem yang dianut pada saat itu yaitu multipartai dimana banyak partai yang mencoba untuk bergantian memegang kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif. Pada sistem parlementer ini usia kabinet

dalam pemerintahannya juga relative singkat yang menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet. (Sedana Arta, 2020)

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode sejarah yang terdiri dari heuristik dengan studi pustaka serta melakukan pencarian sumber baik primer maupun skunder. Kemudian melakukan kritik sumber yang terdiri atas kritik internal maupun kritik eksternal terhadap sumber data yang telah diperoleh. Interpretasi dengan melakukan pemilahan terhadap sumber yang sudah diperoleh dan merangkainya menjadi sebuah deskripsi yang sistematis. Kemudian tahap terakhir yaitu historiografi menuliskan serta menyajikan tulisan dari hasil yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta dan menyusunnya menjadi cerita sejarah yang kronologis serta sistematis hingga menjadi suatu analisis deskriptif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Pemerintahan Demokrasi Parlementer Indonesia**

Sistem demokrasi parlementer ini mulai berlaku setelah sebulan kemerdekaan di proklamirkan kemudian diperkuat oleh UUD 1945-1950, sebenarnya sistem ini kurang cocok untuk digunakan di Indonesia meski sistem ini dapat berjalan dengan lancar pada beberapa negara di kawasan Asia. Sistem pemerintahan demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan politiknya terletak pada parlemen atau badan legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi parlementer ini, rakyat memilih langsung anggota parlemen melalui pemilihan umum dan kemudian anggota parlemen tersebut membentuk pemerintahan. Sistem pemerintahan parlementer juga menerapkan sistem pengumuman suara yang digunakan pada pemilihan umum, mosi serta demonstrasi sebagai bentuk rakyat untuk mengekspresikan haknya untuk turut serta dalam berpolitik. (Maya Ika Virdianik, 1959).

Pada masa ini juga terdapat sistem multipartai yang menyebabkan terbentuknya golongan mayoritas serta golongan minoritas pada masyarakat.

Kemudian menjadikan terbentuknya sikap dimana lebih mementingkan kepentingan dari golongan partai politiknya masing-masing dibandingkan untuk kepentingan bersama. Pada sistem pemerintahan parlementer presiden serta walik presiden tidak memiliki fungsi untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari dan hanya sebagai simbol saja. Berdasarkan pada UUDS 1950 maka kekuasaan legislatifnya dipegang oleh presiden, DPR dan kabinet. Untuk pengaturan pemerintahan sehari-hari serta memimpin kabinet yang telah disetujui presiden dijalankan oleh perdana menteri. Akibat diberlakukannya sistem kepartaian yang menganut pada sistem multipartai maka partai-partai yang menjalankan kekuasaan melalui parlemen.

Akibat terpecahnya partai politik di setiap kabinet berdasarkan kondisi yang berkisar dari hanya satu atau dua partai besar dan beberapa partai kecil. Koalisi tersebut ternyata tidak berjalan mulus dan partai-partai koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu. Hal tersebut berdampak pada sering jatuhnya kabinet karena keretakan yang terjadi dengan koalisi sendiri. Pada umumnya kabinet yang berada pada masa pra-pemilihan umum yang dilakukan tahun 1955 tidak bisa bertahan lebih lama dari delapan bulan (Purnamawati, 2020). Hal tersebut menjadi penghambat bagi perkembangan ekonomi politik dan politik karena pemerintah tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan program kerjanya.

Namun saat ini posisi parlemen sangat kuat dan dalam kesempatan ini juga posisi partai politik menguat. Hal ini terkait dengan kebijakan negara yang tidak terlepas dari sikap kritis anggota parlemen untuk memperdebatkannya baik melalui forum maupun secara individu. Sistem pemerintahan di bidang politik yang dianut pada masa ini adalah kabinet presidensial dimana sistem ini berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan kekuasaan tertinggi negara di pegang oleh lembaga eksekutif yaitu presiden. Pemerintahan yang dijalankan pada masa parlementer ini dijalankan oleh tujuh kabinet kerja yang masa jabatannya yang relatif sangat singkat. Ketujuh kabinet tersebut terdiri dari kabinet Natsir, kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sasatroamidjojo yang menjabat dua kali, dan kabinet Djuanda. (Noviati, 2016)

Adapun dari ketujuh kabinet tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menjaga keamanan serta ketertiban rakyat, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mempersiapkan untuk pemilu kemudian juga ingin

memperjuangkan Irian Barat. Selain itu, pada masa demokrasi parlementer juga dibentuk konstituante yaitu sebuah lembaga yang memiliki tugas untuk menyusun serta menetapkan Undang-Undang Dasar baru bagi Indonesia. Pada sistem parlementer ini juga dapat memberikan stabilitas karena mayoritas parlemen mendukung pemerintah. Akan tetapi jika dukungan tersebut berubah maka pemerintah bisa digantikan bahkan tanpa melalui pemilihan umum.

### **Perubahan Kabinet sebanyak Tujuh Kali**

Pada era demokrasi liberal di Indonesia sering terjadi pergantian kabinet, pergantian kabinet tersebut terjadi hampir setiap tahunnya, hal ini menandakan kekuatan kabinet lemah sehingga dengan mudah dapat digulingkan oleh partai maupun orang lain. Berikut susunan kabinet pada masa demokrasi liberal di Indonesia:

#### **Kabinet Natsir**

Kabinet pertama di era demokrasi liberal adalah kabinet Natsir yang menjabat pada 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Perdana menteri Mohammad Natsir didukung oleh Partai Masyumi dan sejumlah menteri non-partai dalam memimpin kabinet ini. Pada awalnya kabinet ini merupakan kabinet koalisi, akan tetapi PNI yang merupakan partai yang terbesar kedua tidak diberikan kedudukan yang sesuai. Kabinet Natsir mempunyai program kerja yaitu untuk memajukan upaya keamanan dan perdamaian, mencapai konsolidasi dan penyempurnaan struktur pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan bersenjata, mengembangkan dan memperkuat perekonomian rakyat serta menyelesaikan masalah Irian Barat.

Anggota kabinet Natsir terdiri dari Mohammad Natsir dari partai Masyumi, wakil perdana menteri Sri Sultan Hamengkubuwono IX (tidak berpartai), menteri dalam negeri Mr. Assaat (tidak berpartai), menteri luar negeri Mr. Mohammad Roem dari partai Masyumi, menteri pertahanan Dr. Abdul Halim (tidak berpartai), menteri kehakiman Mr. Wongsonegoro (PIR), menteri perdagangan dan perindustrian Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo (PSI), menteri keuangan Mr. Syarifudin Prawiranegara dari partai Masyumi, menteri pendidikan, pengajar dan kebudayaan Dr. Bahder Djohan (tidak berpartai), menteri perhubungan Ir. Djuanda (tidak berpartai), menteri kesehatan Johannes Leimana dari partai Parkinda,

menteri pekerjaan umum dan tenaga kerja Ir. Herling Johannes Loas dari partai PIR, menteri sosial F. S Haryadi dari partai Katolik, menteri tenaga kerja Raden Panji Suroso dari partai Parina, menteri negara Harsono Tjokroaminoto dari partai PSII, menteri agama KH Wahid Hasyim dari partai Masyumi, dan menteri penerangan M.A. Pellaupessy dari Fraksi Demokrasi.

Dalam menjalankan program kerjanya Kabinet Natsir juga mengalami kegagalanyang menyebabkan kabinet ini mengalami ketidakstabilan yang terjadi pada awal tahun 1951. Kegagalan yang terjadi disebabkan karena adanya permasalahan Irian Barat yang tidak kunjung selesai dengan pihak Belanda yang tidak mau mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia. Hal ini menjadi semakin membesar ketika Hadikusumo melontarkan mosi tidak percaya, dan menganggap persoalan terhadap pembentukan DPRD hanya menguntungkan partai Masyumi saja.

Selain itu, PNI juga mendorong dilakukan pemilihan anggota perwakilan daerah yang lebih demokratis. Mosi tersebut kemudian dipercayai oleh pihak dari parlemen, hal ini mengakibatkan hubungan yang terjadi antara kabinet dengan parlemen menjadi tidak terlalu baik, situasi ini diperparah dengan beberapa partai pendukung yang menarik menteri-menterinya dari kabinet Natsir seperti yang dilakukan oleh Partai Indonesia Raya (PIR). Dari adanya kejadian-kejadian tersebut belum genap mencapai satu tahun kabinet Natsir memberikan kembali mandatnya kepada presiden Soekarno.

### **Kabinet Sukiman**

Setelah berakhirnya kabinet Natsir dengan mengembalikan mandatnya kembali sebagai perdana menteri kepada presiden, hal ini memaksa untuk kembali membentuk kembali kabinet baru yang dimaksudkan untuk meneruskan kembali roda pemerintahan. Kabinet kedua yang dibentuk ini merupakan koalisi antara partai Masyumi dengan PNI, dibawah kepemimpinan Dr. Sikuman Wirjosandjojo dari Masyumi dan Suwirjo dari PNI.

Kabinet ini berlangsung selama 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet Sukiman mempunyai program kerja antara lain: pada bidang sosial ekonomi yaitu mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya serta memperbaharui hukum

agrarian yang sesuai dengan kepentingan petani, dan mempersiapkan pemilihan umum. Pada bidang keamanan dan ketentraman melakukan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum. Pada bidang politik luar negeri bebas aktif dan memasukan Irian Barat ke dalam wilayah RI (Republik Indonesia).

Masa kabinet Sukiman juga banyak mengalami hal yang serupa dengan kabinet Natsir yang tidak bertahan lama hanya sekitar 10 bulan saja, kabinet ini juga mendapat tentangan baik dari parlemen maupun internal partai. Kabinet Sukiman ini dinilai telah melanggar politik bebas aktif dan lebih condong terhadap Amerika Serikat. Pada masa Kabinet Sukiman telah ditandatangani perjanjian bantuan ekonomi dan militer dari Amerika kepada Indonesia berdasarkan *Mutual Security Act*. Hal lain yang menjadi penyebab jatuhnya kabinet Sukiman ialah karena lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menangani pemberontakan yang terjadi di daerah seperti pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi.

### **Kabinet Wilopo**

Pasca jatuhnya kabinet Sukiman, presiden menunjuk Sidik Djojokusarto dan Prawoto Mangkusaswitu yang berasal dari Partai Masyumi dan PNI untuk membentuk Kabinet yang baru. Namun sebagai formatur mereka mengalami kegagalan dalam menjalankan tugasnya. Maka presiden Soekarno pada saat itu menunjuk formatur baru yaitu Mr. Wilopo yang berasal dari partai PNI, kemudian pada 30 Maret 1952 Wilopo mengusulkan susunan kabinet yang akan bekerja sama dengannya. Hingga akhirnya kabinetnya berhasil disusun dan ia menjadi ketuanya. Kabinet tersebut terdiri dari partai Masyumi dan PNI yang masing-masing partai menduduki kursi 4 orang, sedangkan partai PSI 2 orang, kemudian untuk Parkindo, PKRI, Parindra, PSII dan partai Buruh masing-masing mendapat kursi 1 orang, dan untuk non partai mendapat kursi 3 orang.

Kabinet Wilopo ini berlangsung selama 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Dengan beberapa program kerja dari kabinet ini yaitu: untuk program dalam negerinya menyelenggarakan pemilihan umum baik kostituante, DPR maupun DPRD, Meningkatkan kemakmuran bagi rakyat, pembebasan Irian Barat, kemudian menjalankan politik bebas aktif, memulihkan keamanan dan menyelesaikan permasalahan hubungan Indonesia-Belanda(Sedana Arta, 2020). Selain menjalankan politik bebas aktif kabinet Wilopo juga memiliki tugas untuk

menghapuskan perjanjian antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang terjadi ketika masa kabinet Sukiman, dengan cara berusaha untuk memperoleh bantuan dengan syarat-syarat yang kurang mengikat (M. C. Ricklefs, 2009:508).

Walaupun kabinet Wilopo ini telah berusaha secara maksimal untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Namun nasibnya sama seperti kabinet-kabinet sebelumnya, kabinet ini digulingkan dengan mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya tersebut diajukan oleh parlemen karena mereka menganggap bahwa kabinet Wilopo dianggap tidak mampu menangani permasalahan kerusuhan yang terjadi di daerah. Pergolakan-pergolakan yang terjadi di daerah itu seperti pergerakan yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi yang disebabkan oleh rasa tidak puas mereka terhadap pemerintahan pusat. Faktor utamanya dipicu oleh tidak meratanya alokasi dana keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Hal ini karena daerah merasa bahwa mereka telah banyak memberikan sumbangan berupa ekspor barang ke pusat lebih besar daripada pemerintah pusat mengembalikannya ke daerah. Hal tersebut mengakibatkan secara resmi kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada presiden Soekarno pada tahun 1953.

### **Kabinet Ali Sastriamidjojo I**

Setelah berakhirnya kabinet-kabinet sebelumnya, maka dibentuklah kabinet baru yang berlaku mulai 31 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955, dengan perdana menterinya Mr. Ali Sastroamidjojo dari partai PNI dan wakilnya Mr. Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya. Pada kabinet Ali, partai Masyumi tidak terlibat didalamnya, namun yang terlibat yaitu NU (Nadhatul Ulama). Kabinet Ali ini mempunyai program kerja yaitu: meningkatkan kesejahteraan dan keamanan serta menyelenggarakan pemilu, mengembalikan wilayah Irian Barat, menjalankan politik bebas dan aktif.

Pada masa kabinet Ali yang pertama terjadi peristiwa yang cukup besar yaitu terselenggaranya Konferensi Asia Afrika (KAA) yang dilaksanakan di kota Bandung. Konferensi Asia Afrika ini digagas oleh perdana menteri dari Indonesia Ali Sastroamidjojo, perdana menteri dari Birma U Nu, perdana menteri dari Srilanka Sir Jhon Kotelawala, kemudian perdana menteri dari Pakistan Mohammed Ali dan perdana menteri dari India Jawaharlal Nehru. Konferensi Asia



Afrika tersebut dilaksanakan pada April 1955. Konferensi tersebut kebanyakan diikuti oleh negara-negara yang masih berkembang yang berada di wilayah Asia-Afrika yang baru mendapatkan kemerdekaanya.

Diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika mempunyai tujuan untuk menjalin kerjasama antara negara-negara kawasan Asia-Afrika dibidang ekonomi dan kebudayaan yang bertujuan untuk melawan kolonialisme atau neokolonialisme yang dilakukan Amerika Serikat, Uni Soviet, dan beberapa negara imperialis lainnya. Selain itu pada masa Kabinet Ali yang pertama ini direncanakan akan diadakan pemilihan umum. Pemilihan umum tersebut rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 1954.

Akan tetapi rencana pemilihan umum tersebut belum sempat untuk dilaksanakan, Kabinet Ali sudah jatuh karena NU menarik diri dari kabinet Ali karena berseteru dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Jatuhnya Kabinet Ali juga disebabkan oleh keadaan ekonomi yang kian memburuk kemudian terjadinya korupsi yang mengakibatkan rakyat kehilangan kepercayaanya kepada Kabinet Ali yang pertama.

### **Kabinet Burhanudin Harahap**

Setelah jatuhnya Kabinet Ali kemudian di bentuk Kabinet yang baru yaitu Kabinet Burhanudin yang berlangsung selama 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini berhasil disusun oleh Burhanudin yang berasal dari Partai Masyumi yang mendapatkan dukungan dari PSI dan NU. Program kerja yang dimiliki oleh Kabinet Burhanudin yaitu sebagai berikut: mengembalikan wibawa pemerintah dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat dan angkatan darat kepada pemerintah, melaksanakan pemilihan umum yang sempat direncanakan di kabinet sebelumnya, mempercepat pembentukan parlemen yang baru, mengatasi masalah desentralisasi, masalah inflasi, kemudian memberantas korupsi, dan memperjuangkan pengembalian Irian Barat, menjalankan politik kerjasama Asia-Afrika menurut politik luar negeri bebas aktif.

Kabinet Burhanudin ini lebih memprioritaskan program kerjanya untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Hingga pada masa Kabinet ini pemilihan umum berhasil untuk diselenggarakan pada 29 September 1955. Pemilu sebagai

salah satu alat penting dalam demokrasi sebenarnya sudah menjadi agenda dalam program kerja kabinet yang pertama dibawah kepemimpinan Natsir, serta ada dalam kabinet-kabinet setelahnya akan tetapi belum sempat untuk terlaksana kabinet-kabinet tersebut sudah jatuh terlebih dahulu. Baru setelah masa Kabinet Wilopo RUU tentang pemilu diajukan ke parlemen dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang.

Pemilihan umum yang terlaksana di era Kabinet Burhanudin ini digunakan untuk memilih sebanyak 257 anggota DPR serta untuk memilih sebanyak 514 anggota konstituante pada 15 Desember 1955. Hasil yang diperoleh pada pemilihan umum 1955 yaitu memunculkan empat kekuatan besar partai yaitu PNI, Masyumi, PKI dan NU. Berdasarkan dari hasil pemilu tersebut pada kursi DPR di duduki oleh Partai Masyumi sebanyak 57 kursi, PNI sebanyak 57 kursi, NU sebanyak 45 kursi dan PKI sebanyak 39 kursi kemudian untuk peserta lain sebanyak 81 kursi. Sedangkan untuk kursi Konstituante diduduki oleh partai Masyumi sebanyak 119 kursi, PNI sebanyak 112, NU sebanyak 91 kursi, dan PKI sebanyak 81 kursi, kemudian untuk peserta lain sebanyak 118 kursi.

Akan tetapi hasil pemilihan umum yang diperoleh tersebut tidak memberikan kepuasan terhadap pihak manapun. Terutama terhadap kedua partai besar Masyumi dan PNI, kedua partai tersebut menginginkan perolehan dukungan secara mutlak. Akibat ketidakpuasan tersebut menyebabkan banyak partai yang menarik menteri-menterinya dari Kabinet Burhanudin. Hal tersebut mengakibatkan jatuhnya Kabinet Burhanudin yang mengembalikan mandatnya kepada presiden Soekarno pada tahun 1956.

### **Kabinet Ali Sastriamidjojo II**

Setelah kembali jatuhnya kabinet sebelumnya, kabinet Ali kembali berdiri kabinet ini merupakan koalisi dari PNI, Masyumi dan NU. Kabinet ini berlangsung selama 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kabinet Ali II ini memiliki program kerja antara lain: pembatalan terhadap hasil dari perjanjian KMB, mewujudkan perjuangan kekuasaan de Facto Indonesia atas Irian Barat berdasar pada kekuatan rakyat serta kekuatan anti kolonial di dunia internasional, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif untuk mencapai perdamaian dunia, melanjutkan kerjasama Asia-Afrika.

Kabinet Ali II ini juga tidak memiliki usia yang lama, hal ini dipicu karena sering terjadi perbedaan pendapat antara koalisi dengan orang yang ada di dalam kabinet. Selain itu adanya sikap oposisi dari presiden Soekarno yang menginginkan pembentukan kabinet berkaki empat. Kabinet berkaki empat yang diinginkan oleh Soekarno tersebut dengan inti pendukungnya dari PNI, Masyumi, PKI dan NU. Sedangkan pada Kabinet Ali II ini PKI tidak diikutsertakan dalam partai koalisi.

Wakil presiden Moh. Hatta mengundurkan diri dari jabatannya pada masa Kabinet Ali II ini, karena Moh. Hatta beranggapan bahwa setelah terbentuknya DPR dan Konstituante dirinya harus melepaskan jabatannya. Selain itu terdapat alasan lain mengapa Moh. Hatta mengundurkan diri, hal itu karena perbedaan pendapat yang terjadi dengan presiden Soekarno dalam arah politik, mereka juga sering mengalami perbedaan pendapat dalam mengambil suatu keputusan. Jatuhnya kabinet Ali II ini munculnya semangat anti China pada masyarakat, kemudian munculnya pergolakan yang terjadi di daerah yang semakin menguat serta mengarah pada gerakan sparatisme.

### **Kabinet Djuanda**

Pasca jatuhnya Kabinet Ali II, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet baru dengan menunjuk Soewirjo sebagai formatur dalam pembentukan kabinet baru tersebut. Namun, setelah dua kali mencoba Soewirjo gagal membentuk kabinet. Hingga akhirnya Presiden Soekarno menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur. Sebagai formatur Soekarno membentuk kabinet darurat ekstra parlementer dan kemudian mengangkat Djuanda sebagai perdana menteri. Kabinet ini diberi nama kabinet Djuanda atau kabinet Karya yang beranggotakan dua orang angkatan bersenjata, kabinet ini juga merupakan satu-satunya kabinet yang tidak berasal dari partai politik.

Kabinet Djuanda berlangsung dari 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959, kabinet ini mempunyai program kerja antara lain membentuk dewan nasional, menormalisas keadaan NRI (Negara Republik Indonesia), melanjutkan melakukan pembatalan perjanjian KMB, memperjuangkan kembalinya Irian Barat, dan mempercepat pembangunan. Meskipun beberapa terjadi pergantian kabinet pada saat itu, namun pergolakan yang terjadi di daerah-daerah seolah tidak ada habisnya.

Pada era Kabinet Djuanda terjadi pemberontakan antara PRRI dan Permesta, pemberontakan ini terjadi karena adanya konflik internal di lingkungan Angkatan Darat. Kekecewaan yang dialami oleh anggota akibat rendahnya kesejahteraan di Sumatera dan Sulawesi akhirnya mendorong beberapa dari tokoh militer untuk melakukan penentangan terhadap kebijakan dari KSAD dan pemerintah pusat. Hal ini yang kemudian menyebabkan semakin maraknya tuntutan pada otonomi daerah yang melibatkan para politisi. Pada masa Kabinet Djuanda terjadi pergolakan-pergolakan yang cukup besar di daerah akibat rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat yang dianggap tidak memikirkan pembangunan untuk daerah.

Pergolakan ini terjadi di setiap daerah yang merasa tidak puas dengan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah, mereka membentuk organisasi militer yang bertujuan untuk menentang kebijakan pemerintah. Seperti yang terjadi di beberapa daerah seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Hingga pada tanggal 2 Maret 1957 diumumkan piagam perjuangan semesta (Piagam Permesta) yang meliputi daerah Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku. Rentetan kejadian yang terjadi di daerah-daerah tersebut membuktikan bahwa pemerintah sebenarnya belum mampu merangkul seluruh golongan dan daerah-daerah yang ada di Indonesia untuk bersatu dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih.

Kabinet Djuanda ini jatuh ketika presiden merencanakan dekrit bulan pada Juli 1959. Akhirnya dekrit presiden dikeluarkan karena konstituante dianggap gagal dan belum mampu membentuk UUD baru sebagai pengganti UUDS yang terjadi pada 9 Juli 1959 yang merupakan menjadi akhir dari demokrasi liberal di Indonesia. Dari penjelasan diatas menegaskan bahwa demokrasi liberal di Indonesia berakhir ketika Presiden mengeluarkan dekrit presiden tahun 1959. Meskipun dalam penerapan demokrasi liberal sering mengalami guncangan politik karena seringnya pergantian kabinet, namun pada periode tersebut berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pertama yang diadakan pada tahun 1955.

### **Dampak dari Perubahan Kabinet Kerja Terhadap Stabilitas Politik**

Berlangsungnya demokrasi liberal di Indonesia yang terjadi selama 10 tahun dari 1949 sampai 1959 yang dipimpin oleh presiden Soekarno. Selama itu berlangsung,

diberlakukan sistem multipartai yang berdasar pada maklumat pemerintah 3 November 1945. Dengan diberlakukannya sistem multipartai ini mendorong banyak munculnya partai-partai politik di Indonesia. Akan tetapi banyaknya partai politik yang ada ini Indonesia masa liberal lebih cenderung kepada kepentingan partainya sendiri dibanding dengan kepentingan bangsa. Hal tersebut yang menyebabkan sering terjadinya perubahan kabinet kerja pada masa itu. Dari adanya perubahan kabinet yang terjadi tersebut menyebabkan ketidakstabilan politik Indonesia antara lain:

Adanya kompetisi politik yang cukup intens, dimana pada masa demokrasi liberal berbagai partai politik cukup aktif untuk bersaing mendapatkan dukungan dari publik untuk memperoleh kursi parlemen. Hal tersebut menciptakan dinamika politik yang cukup kompetitif, akan tetapi kompetisi politik yang terjadi begitu sengit sering kali mengakibatkan ketegangan politik. dimana partai-partai politik bersaing menggunakan cara yang cukup agresif serta pemilihan umum dijadikan ajang untuk bersaing secara sengit. Hal ini bisa menyebabkan terganggunya stabilitas politik Indonesia pada masa itu.

Terjadinya perebutan kekuasaan, ditengah kompetisi politik yang cukup ketat mengalami serangkaian pergantian komposisi kabinet. Perubahan ini sering terjadi karena hasil dari upaya dari berbagai partai politik untuk memperoleh pengaruh serta tempat didalam pemerintahan. Perebutan kekuasaan yang terjadi antar partai serta kelompok politik ini menyebabkan ketidakstabilan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Hal ini dipicu karena sering terjadinya pergantian kabinet dan arah kebijakan yang berubah.

Adanya polarisasi politik, tercipta karena kompetisi politik yang cukup sengit serta perebutan kekuasaan yang menyebabkan terjadinya polarisasi politik dalam masyarakat. Hal tersebut bisa terjadi karena pemilih serta pendukung dari partai-partai sering terbagi menjadi beberapa kubu yang saling bersaing untuk memperoleh dukungan. Akibatnya bisa menciptakan ketidakharmonisan serta konflik politik yang bisa menggoyahkan stabilitas politik.

Adanya tekanan dari luar, selama berlangsungnya demokrasi liberal Indonesia mendapatkan tekanan politik dari berbagai negara, terutama ketika terjadinya perang dingin. Baik dari blok barat dan timur saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh di Indonesia. Tekanan yang terjadi dari pihak luar tersebut dapat mempengaruhi

kebijakan luar negeri Indonesia serta menambah ketidakpastian politik dalam negeri Indonesia.

Terjadinya perubahan kebijakan, perubahan yang terjadi dalam komposisi kabinet dan pergantian pejabat pemerintah seringkali menghasilkan perubahan dalam kebijakan pemerintah. Hal ini dapat berdampak langsung pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kebijakan ekonomi, sosial, dan politik. Perubahan kebijakan ini dapat menciptakan ketidakpastian dalam masyarakat karena orang mungkin harus beradaptasi dengan perubahan yang cepat terhadap kebijakan yang baru ditetapkan.

Terjadinya konflik regional, adanya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat menyebabkan beberapa daerah melakukan pergolakan dan menginginkan otonomi daerah yang lebih besar karena merasa tidak diwakili oleh pihak pemerintah pusat. Hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan politik di tingkat daerah yang bisa meluas sampai ke tingkat nasional.

Demokrasi liberal merupakan periode yang cukup dinamis terhadap sejarah politik Indonesia, dimana terjadi transisi menuju demokrasi yang lebih baik sedang dilakukan. Oleh sebab itu, stabilitas politik Indonesia sering mengalami tantangan yang sangat kompleks dari berbagai dinamika politik selama periode ini berlangsung. Stabilitas ini kemudian mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan diterapkannya orde baru yang dimulai tahun 1960-an dengan dibawah pemeritahan Soeharto.

## **Kesimpulan**

Demokrasi liberal Indonesia berlangsung selama Sembilan tahun, yakni sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 yang di sebut dengan sistem parlementer. Sistem politik pada masa demokrasi liberal ini mendorong lahirnya partai politik, hal ini dikarenakan sistem yang dianut pada saat itu adalah sistem multi partai dimana banyak partai yang berusaha secara bergantian untuk memegang kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif. Dalam sistem parlementer ini usia kabinet dalam pemerintahannya juga relative singkat sehingga menyebabkan seringnya terjadi pergantian kabinet. Pada era demokrasi liberal di Indonesia sering terjadi pergantian kabinet, pergantian kabinet ini hampir terjadi setiap tahunnya, hal ini menandakan

kekuatan kabinet lemah sehingga mudah digulingkan oleh partai atau orang lain. Mulai dari kabinet Natsir yang berlangsung selama 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951, Kabinet Sukiman berlangsung selama 27 April 1951 sampai 3 April 1952, Kabinet Wilopo berlangsung selama 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953, Kabinet Ali Sostroamidjojo I berlaku dari 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955, Kabinet Burhanudin yang berlangsung selama 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956, Kabinet Ali Sostroamidjojo II berlangsung selama 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957, dan Kabinet Djuanda berlangsung selama 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959.

Berlangsungnya demokrasi liberal di Indonesia yang terjadi selama 10 tahun dari 1949 sampai 1959 yang dipimpin oleh presiden Soekarno, Selama itu berlangsung diberlakukan sistem multipartai. Akan tetapi banyaknya partai politik yang ada ini Indonesia masa liberal lebih cenderung kepada kepentingan partainya sendiri dibanding dengan kepentingan bangsa. Hal tersebut yang menyebabkan sering terjadinya perubahan kabinet kerja pada masa itu. Hal ini menyebabkan beberapa dampak yang terjadi yaitu Adanya kompetisi politik yang cukup intens, terjadinya perebutan kekuasaan, adanya polarisasi politik, adanya tekanan dari luar, terjadinya perubahan kebijakan, dan terjadinya konflik regional.

## **Daftar Pustaka**

Anggara, S. (2013). Sistem Politik Indonesia (Vol. 1, No. 1). CV Pustaka Setia.

Fahum.umsu.ac.id “ Demokrasi Parlementer Pengertian, ciri, Aspek, Prinsip, dan Penerapan”. [Kompas.com “Keadaan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal”. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/16/161915979/keadaan-politik-pada-masa-demokrasi-liberal?page=all#>, diakses pada 5 September 2023 pukul 08:24 WIB.](https://fahum.umsu.ac.id/sdemokrasi-parlementer-pengertian-ciri-aspek-prinsip-dan-penerapan/#:~:text=Sistem%20demokrasi%20parlementer%20adalah%20sistem,parlemen%20tersebut%20kemudian%20membentuk%20pemerintahan., diakses pada 1 September 2023 pukul 12.01 WIB.</a></p></div><div data-bbox=)

Kompas.com “Kembali ke Negara Kesatuan”.  
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/12/173000869/kembali-ke-negara-kesatuan?page=all>, diakses pada 31 Agustus 2023 pukul 09:45 WIB.

Kompas.com “Mengapa Sering Terjadi Pergantian Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal?”  
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/31/090000179/mengapa-sering-terjadi-pergantian-kabinet-pada-masa-demokrasi-liberal-?page=all>, diakses pada 1 September 2023 pukul 03:02.

Maya Ika Virdianik. (1959). No Title بىلى. Nucl. Phys., 13(1), 104–116.

Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. Jurnal Konstitusi, 10(2), 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>

Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi Di Indonesia. Solusi, 18(2), 251–264. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.290>

Sedana Arta, K. (2020). Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Dan Tercapainya Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955 Di Indonesia. Jurnal Widya Citra, 1(2), 69–85.

Setiawan, J., Permatasari, W. I., & Kumalasari, D. (2018). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959. HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, 6(2), 365. <https://doi.org/10.24127/hj.v6i2.1250>

Setiawan, J., Permatasari, W. I., & Kumalasari, D. (2018). Sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950-1959. HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, 6(2), 365-378.

Sihombing, N. L. (2015). Peranan Boerhanoedin Harahap Pada Masa Demokrasi Liberal (1955-1956) (Doctoral dissertation, UNIMED).

Simbolon, R. (2018). Pengaruh Sistem Multi Partai Pada Masa Demokrasi Liberal Terhadap Stabilitas Politik Di Indonesia 1950-1959 (Doctoral dissertation, UNIMED).

Sudarwanto Pujosantoso. (2018). Demokrasi liberal (1950-1959) dan demokrasi terpimpin (1959-1966). Pontianak :: Derwati Press,.